

Jalan di Daerah Rusak, Bupati Garut Kritik Presiden Jokowi

GARUT (IM)- Banyaknya infrastruktur jalan rusak di berbagai daerah termasuk kerusakan jalan yang mendapatkan peninjauan langsung Presiden RI Joko Widodo dan menjadi sorotan masyarakat belakangan ini membuat Bupati Garut, Rudy Gunawan turut bersuara.

Rudy menilai kerusakan jalan di daerah termasuk di Kabupaten Garut bukan semata kesalahan pemerintah daerah melainkan justru karena kebijakan Pemerintah Pusat yang menarik keuangan daerah ke Pusat untuk program Perlindungan Sosial berkaitan Covid-19.

Rudy bahkan mengkritik Presiden Joko Widodo yang terkesan hanya bungkam mengenai hal tersebut. "Saya bukan bela kepala daerah. Harusnya Presiden ngomong. Tahun 2020, 2021, 2022, mohon maaf semua uang daerah ditarik. Ditarik Pak, kita ini. Diefisiensi sama Pusat dan uang daerah wajib direlokasi, dialihkan. Untuk apa? Untuk perlindungan sosial karena covid-19," kata Rudy saat membuka Musyawarah Daerah (Musyda) Muhammadiyah ke-14 Garut di SMA Muhammadiyah Wanaraja Kecamatan Wanaraja, Sabtu (20/5).

Rudy mengemukakan hal itu sekaligus menjawab pertanyaan banyak orang mengenai kondisi jalan dari arah Wanaraja menuju obyek wisata Taman Wisata Alam Talaga Bodas serta daerah lainnya yang terkesan dibiarkan rusak. "Jalan ke sini (Wanaraja-Talaga Bodas) harusnya sudah beres. Ada GSW, Garut Sukawening. Sekarang baru sampai ke Nagrog, kira-kira pembebasan tanahnya," ujarnya.

Dia menyebutkan, jalan GSW itu merupakan cadangan yang akan kembali digarap tahun depan. Di tahun 2024 sendiri, masa jabatan Rudy sebagai Bupati Garut berakhir. "Saya membuat jalan GSW itu cadangan. Saya hanya meminta kepada Bupati nanti, kalau saya sudah meninggal dunia, jalan ini adalah (dinamai) Jalan Rudy Gunawan," katanya sedikit berseloroh disambut tawa hadirin.

Berkeinginan jalan Wanaraja-Talaga Bodas sendiri, Rudy meyakini segera dilakukan perbaikan pekan depan dengan rabat beton.

● pra

Dewan Minta Kajian Dampak Ekonomi Revitalisasi Jembatan Otista di Kota Bogor

BOGOR (IM)- Revitalisasi jembatan Otista di Kota Bogor, berdampak terhadap para pelaku usaha UMKM yang berlokasi di sekitar jembatan Otista. Komisi IV DPRD Kota Bogor juga telah menggelar rapat kerja dengan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian (Diskopukmdagin) Kota Bogor pada Jumat lalu.

"Jadi kami ingin mengetahui, apakah OPD terkait sudah melakukan pendataan bagi pelaku usaha UMKM dan berapa jumlah pelaku usaha yang terdampak dan potensi kerugian mereka dari pembangunan jembatan otista," ungkap Ketua Komisi IV DPRD Kota, Akhmad Saeful Bahki kepada wartawan pada Minggu (21/5).

Saeful melanjutkan, dari Rapat dengar pendapat ini, Komisi IV DPRD Kota Bogor berharap agar Pemerintah Kota Bogor tidak hanya fokus pada kajian teknis semata. Namun, Pemkot Bogor pun harus mengkaji dampak ekonomis para pelaku usaha bukan hanya di jalan Otista saja. "Kajian ekonomis nantinya diharapkan menjadi acuan dalam mengambil langkah dan rencana strategis dari mulai pemetaan, relokasi dan evaluasi dari dampak pembangunan jembatan Otista," tutur politisi PPP ini.

"Kami ingin memastikan, upaya dan langkah apa saja yang dilakukan Pemkot Bogor. Karena, ada dampak kerugian yang diterima oleh para pelaku usaha. Apakah, dengan cara merelokasi atau memberikan bantuan untuk pelaku UMKM. Jangan sampai, pelaku usaha khususnya UMKM sampai

gulung tikar," tambah pria yang akrab disapa Gus M.

Gus M juga mengatakan, pembangunan jembatan otista yang direncanakan memakan waktu 7,5 bulan ini tentunya tidak hanya berpengaruh bagi pelaku usaha UMKM saja. Penurunan okupansi hotel di Kota Bogor harus menjadi perhatian.

"Dari penyampaian yang disampaikan OPD terkait, dampak ekonomi diminggu pertama pembangunan pelaku usaha mengalami penurunan omset hampir 60 persen. Namun, seiring adanya rekayasa lalin dan solusi lainnya angka ini terus menurun," terang Gus M.

Gus M menegaskan, Komisi IV DPRD Kota Bogor meminta Pemerintah Kota Bogor untuk mengambil langkah cepat dan strategis serta solutif dalam persoalan ini. Ia juga meminta Pemkot Bogor untuk mengkaji dan mengkalkulasi apa yang tadi disampaikan oleh dinas terkait. Bahwa, ada potensi dampak kerugian bagi pelaku usaha di Kota Bogor.

"Kami kuatir, jika hal ini dibiarkan dapat berpengaruh kepada APBD Kota Bogor yang selama ini ditunggang dari pajak hotel, restoran dan hiburan di Kota Bogor. Harapan kami, jangan sampai berpengaruh dan berdampak juga terhadap APBD Kota Bogor. Ingat loh, bukan hanya jalan Otista yang terdampak tapi jalan Pajajaran, Sudirman dan ruas jalannya lainnya juga harus dikaji dampak ekonomisnya," tegasnya. ● pra

Plt. Bupati Bogor Iwan Setiawan Terima Penghargaan Kategori Pupuhu Pangaping HPN Tingkat Jawa Barat Tahun 2023



Plt. Bupati Bogor, Iwan Setiawan terima penghargaan kategori Pupuhu Pangaping pada Perayaan HPN Tingkat Jawa Barat Tahun 2023.

KARAWANG (IM)- Mewakili Plt. Bupati Bogor, Iwan Setiawan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bogor, Bayu Ramawanto didampingi Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) menerima secara langsung penghargaan yang diberikan kepada Plt. Bupati Bogor, Iwan Setiawan.

Plt Bupati Bogor menerima penghargaan kategori Pupuhu Pangaping dalam kegiatan malam Anugerah Persatuan Wartawan Indonesia Jawa Barat tahun 2023,

pada puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) tingkat Jawa Barat tahun 2023, yang berlangsung di Hotel Mercure Karawang, Sabtu (20/5).

Dengan mengusung tema Bunga Tarum, serangkaian kegiatan turut memeriahkan puncak perayaan HPN tingkat Jawa Barat tahun 2023 itu. Antara lain, gelar seni napak jagat tarumanagara dan bazaar UMKM. Hingga malam penganugerahan dan penghargaan kepada sejumlah tokoh dan pejabat serta ditutup dengan kegiatan city tour. ● gio

8 | Nusantara



IDN/ANTARA

AKSI BERSIH SAMPAH PLASTIK

Sejumlah mahasiswa dan pegiat lingkungan memungut sampah botol plastik bekas di muara sungai kawasan Pantai Lampulo, Banda Aceh, Aceh, Minggu (21/5). Aksi peduli lingkungan tersebut melibatkan Aceh Birding Club dan Himpunan Mahasiswa Biologi FKIP Universitas Syiah Kuala (USK) dalam rangka peringatan World Migratory Bird Day dengan tema "Air Untuk Masa Depan" untuk mengkampanyekan bahaya mikroplastik bagi penduduk dan burung yang bermigrasi.

Juni, Dinas Pendidikan Mulai Lelang Proyek Pengadaan Barang Jasa

Poyek pengadaan barang jasa ini akan membangun ruang kelas baru, merevitalisasi, membebaskan lahan hingga membangun gedung sekolah baru. Selain itu membangun banyak ruang kelas baru dan merevitalisasi, serta pembebasan lahan untuk SMPN 2 Tajurhalang dan membangun Gedung SMPN 5 Cibinong.

CIBINONG (IM)- Proyek belanja barang jasa Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dengan total anggaran

Rp 440 miliar, belum satu pun yang dilelang oleh Kantor Pengadaan Barang Jasa. Padahal, waktu tersisa tahun

ini hanya 7 bulan lagi.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Juanda Dimansyah mengatakan belum dilelangnya sejumlah proyek belanja barang jasa di dinasnya karena masih dalam tahap perencanaan.

"Kami masih dalam tahap perencanaan, rencananya Bulan Juni mendatang baru akan melelang proyek-proyek pengadaan barang jasa," kata Juanda Dimansyah kepada wartawan, Minggu (21/5).

Juanda Dimansyah menuturkan, bahwa proyek pengadaan barang jasa ada yang membangun ruang kelas baru, merevitalisasi, membebaskan lahan hingga

membangun gedung sekolah baru.

"Selain membangun banyak ruang kelas baru dan merevitalisasi, kami juga membebaskan lahan untuk SMPN 2 Tajurhalang dan membangun Gedung SMPN 5 Cibinong," tuturnya.

Mantan Camat Gunung Putri ini optimis pembangunan ruang kelas baru revitalisasi dan gedung baru tidak lagi meluncur ke awal tahun selanjutnya, seperti yang terjadi tahun anggaran lalu yaitu pembangunan ruang kelas baru SMPN 2 Cibinong.

"Waktu pembangunan rata-rata butuh waktu 120 hari, hingga cukup waktu

untuk menuntaskan proyek pengadaan barang jasa atau infrastruktur pendidikan," sambungnya.

Sementara Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor Ridwan, Muhibi meminta Dinas Pendidikan mempercepat proses lelang pengadaan barang jasa.

"Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor mendorong, agar Dinas Pendidikan segera melakukan percepatan dan jangan sampai ada proyek yang meluncur ke awal Tahun 2024. Di Bumi Tegar Beriman cuaca bisa saja tiba-tiba hujan hingga harus diantisipasi oleh dinas maupun penyedia jasa," pinta Ridwan Muhibi. ● gio

Warga Klaim yang Diaspal Oknum Bukan Jalan Desa Bojong Koneng

BOGOR (IM)- PT Sentul City Tbk menilai penyetopan pengerjaan jalan desa yang dilakukan petugas PT Sentul merupakan hak dari institusinya. Apalagi Kepala Desa Bojong menguatkan bahwa yang diaspal warga bukan jalan desa.

"Wong bukan jalan desa kok diajui jalan desa, padahal pak Kades Bojong Koneng bantah bukan jalan desa, kok maksain bangun jalan desa," ujar seorang petugas PT Sentul City mengutip keterangan Kades Bojong Koneng, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Sabtu (20/5). Peristiwa yang sempat tersiar

adanya penyetopan jalan yang dibangun oleh oknum yang mengaku warga desa pertengahan Mei 2023 di Kampung Tapos, RT 03/ RW 04, Desa Bojongkoneng, akhirnya pihak lain segera melakukan koordinasi dengan tokoh pemerintahan setempat untuk memperjelas fakta dan kebenaran berita tersebut.

Pihak Desa Bojong Koneng, kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor pada 19 Mei 2023, bahwa hasil investigasi apakah betul ada warga desa yang membangun jalan secara swadaya dan distop pengembang. Pada kesempatan tersebut Kepala

Desa Bojongkoneng, Rusdi Anwar, menjelaskan bahwa jalan yang sedang diaspal bukan jalan desa dan tidak tercatat sebagai jalan desa.

Hal tersebut dikuatkan oleh Kepala Dusun setempat, Cecep Suhandar yang meninjau ke lokasi kejadian bersama media. Dia menceritakan sebagai warga asli yang sejak kecil tinggal di tempat tersebut, bahwa jalan itu dulunya adalah Perkebunan. Hasil penelusuran, pengaspal jalan yang mengaku warga, ternyata warga pendatang dan diduga spekulasi yang membeli lahan dalam area ijin lokasi Sentul City. ● gio

Plt Bupati Bogor Ajak BPPKB Banten Jaga Kondusifitas dan Kawal Pembangunan

CIBINONG (IM)- Plt. Bupati Bogor, Iwan Setiawan mengajak Badan Pembinaan Potensi Keluarga Besar (BPPKB) Banten menjaga kondusifitas wilayah dan mengawal pembangunan di Kabupaten Bogor.

Ia juga meminta BPPKB Banten membangun sinergitas dan komunikasi yang baik dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.

Pesan tersebut ia sampaikan

saat menghadiri penguatan pengurus Badan Pembinaan Potensi Keluarga Besar (BPPKB) Banten DPC Kabupaten Bogor dan penguatan KSB se-Kabupaten Bogor, di Sentul International Circuit, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Minggu (21/5).

Hadir dalam kesempatan itu perwakilan Forkopimda Kabupaten Bogor, Ketua Umum BPPKB Banten DPP Pusat,

Ketua BPPKB Banten DPD Jawa Barat, Ketua BPPKB Banten DPC Kabupaten Bogor, Wakil Bupati Bogor periode 2009-2013, H. Karyawan Faturahman, Anggota DPRD Kabupaten Bogor, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Bogor, jajaran Ketua PAC, pengurus dan anggota DPC BPPKB Banten Kabupaten Bogor. ● gio



Iwan Setiawan mengajak BPPKB Banten untuk menjaga kondusifitas dan Kawal Pembangunan Kabupaten Bogor.

PWI Pusat Apresiasi HPN di Karawang, Tiga Negara Ramaikan Napak Jagad Tarumanegara

BOGOR (IM)- Gebyar Hari Pers Nasional (HPN) dan HUT PWI ke 77 dipusatkan di Karawang, Provinsi Jawa Barat (Jabar).

Acara ini berlangsung meriah dan mungkin paling megah sejak digelar HPN dan HUT PWI di Jabar, di mana rangkaian kegiatan tersebut selain sejumlah budaya setempat dieksplor, juga sejumlah turis asing ikut meramaikan gelaran tahunan yang didukung oleh PWI Jabar.

Gelaran HPN dan HUT PWI tingkat Jabar ini mendapat apresiasi sejumlah kalangan termasuk Ketua Umum (Ketum) PWI Pusat, Atal Depari.

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Atal S Depari menyebut peran jurnalis, selain memberikan kritik terhadap kinerja pemerintah, juga bisa memberikan sosialisasi kebudayaan dan memberikan kontribusi pemikiran pembangunan daerah maupun pusat. Insan pers juga turut terlibat dalam membangun budaya yang bernilai positif bagi pembangunan.

"Karena itu, penting kiranya bagi wartawan untuk mengerti dan turut mengkampanyekan budaya asli Indonesia, agar tetap terjaga," kata Ketua PWI Pusat dalam sambutannya di acara Gala Dinner dengan Delegasi Luar Negeri Dalam Rangka Peringatan HPN dengan Tema Napak Jagad Tarumanegara, Jumat (19/5) malam, yang digelar PWI Karawang berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Karawang serta LSM Lodaya.

Acara Gala Dinner ini diikuti oleh 13 peserta dari 3 negara yakni India, Singapura dan Korea Selatan.

Negara negara tersebut merupakan negara anggota Federation Of International Dance Festival (FIDAF) yang turut berpartisipasi dan tampil menari di Galuh Street Carnival, Sabtu bersama ratusan peserta dari Provinsi Jawa Barat dan sekitarnya.

Atal sangat mengapresiasi gelaran budaya tersebut. Menurutnya dengan adanya acara kebudayaan pada perayaan HPN, PWI Karawang berhasil memberikan warna berbeda. PWI Karawang membuktikan dukungannya terhadap kebangkitan budaya lokal.

"Setiap tahun, PWI pusat mengadakan anugerah kebudayaan bagi kepala daerah yang membangun daerahnya dengan pendekatan budaya. Tahun ini ada 10 daerah pemenang dengan mengusung tema papan, sandang, pangan berbasis budaya," jelasnya.

Sementara Sekda Karawang, H. Acep Jamhuri mengatakan acara ini terlaksana karena adanya kolaborasi antara jurnalis PWI Karawang, paguyuban seni dan pemerintah daerah.

Sekda menyampaikan ucapan selamat datang dan terima kasih kepada para peserta seniman dan budayawan luar negeri yang telah bersedia datang ke Indonesia, khususnya di bumi pangkal perjuangan. "Latar belakang kegiatan ini yakni untuk menggali kembali sejarah Karawang dari masa ke masa melalui pertunjukan seni tari untuk melestarikan kearifan lokal," ucapnya.

Hadir di acara tersebut Ketua FIDAF Pusat, Ketua FIDAF Jabar, Ketua PWI Jabar, Ketua IKWI Pusat, Ketua IKWI Jabar, Ketua PWI Karawang. ● gio